

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Makassar: Kencana

Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barak Aharon. 2008. *The Judge in a Democracy*, New Jersey: Princeton University Press

Chandra M Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka.

Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. 1982. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta.

Elwi Danil, dkk. 2015. *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum*. Padang: PT Raja Grafindo Persada.

Fatmawati. 2004. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang dimiliki hakim dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

H.M. Abdurrachman 1989. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: BP. Univ.Trisakti.

Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media.

Kelsen Hans. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Normatif, Prinsip-Prinsip Teoritis untuk mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*. Bandung: Nusa Media.

Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Loebby Loqman. 1990. *Pra-Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indoneisa

Luhut.M.P Pangaribuan. 2014. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sianar Sinanti.

_____. 2015. *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc*. Jakarta : Papas Sianar Sinanti.

Maruarar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika..

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip.

Nurbani, Erlies Septiana dan Salim. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

P.A.F Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Rawls John. 2006. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Ronald S Lumbuun. 2011. *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Press

Rusdi Kailimang, O.C.Kaligis, dkk. 2000. *Praktek Preperadilan Dari Waktu ke Waktu*. Jakarta: Otto Cornelis Kaligis & Associates.

Rusli Muhamad. 2010. *Hukum Acara Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika

R Soeparmono. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.

Salam, Moch Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Tim Peneliti ICJR. 2014. *Praperadilan di Indonesia Teori, Sejarah, dan Prakteknya*. Jakarta: ICJR.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Tim PERADI. 2010. *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial, Butir-Butir Pikiran PERADI untuk Draft RUU-KUHAP*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti,

Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Bebearapa Negara)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Widjono Hs. 2007. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Grasindo.

Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Adnan Buyung Nasution. 2002. “ *Praperadilan Vs Hakim Komisaris, Beberapa Pemikiran Tentang Keduanya*”. Newsletter Komisi Hukum Nasional.

Ramiyatno. 2015. “*The Position of The Determination of The Suspect in The Pretrial Lawsuit Objects*”, *Indonesian Journal of Legislation*, Vol.12 No.4.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

D. Putusan

Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Putusan Praperadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.
Putusan Praperadilan Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

